

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- A.Gde Agung. 2017. Hukum Pidana dan Prosedur Pidana. Jakarta: Rajawali Press.
- Andi Hamzah. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Bambang Waluyo. 2017. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Pramono. 2018. Hukum Acara Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju.
- Eddy Soehatno. 2016. Hukum Pidana dan Prosedur Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Haryono. 2019. KUHAP dan Implementasinya. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Wiratha. 2018. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Joko Widodo. 2017. Hukum Acara Pidana dan Praktiknya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2016. Hukum Acara Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Ali. 2016. Hukum Pidana dan Prosedur Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Nasir. 2018. Hukum Acara Pidana dan Perlindungan Korban. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2019. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Cetakan ke-16. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soekanto. 2016. Hukum dan Prosedur Pidana. Jakarta: Bina Aksara.

Romli Atmasasmita. 2015. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.

S. Nasution. 2017. Hukum Acara Pidana dan Praktiknya. Jakarta: Rajawali Press.

Soerjono Soekanto. 2015. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sudirman Tebba. 2018. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suyono. 2020. Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Praktis. Jakarta: Prenada Media.

T. Mulyo Aji. 2019. Hukum Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Kencana.

Wirjono Prodjodikoro. 2016. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Refika Aditama.

Y. Priyanto. 2018. Hukum Acara Pidana dan Implementasinya. Bandung: Mandar Maju.

Z. Ahmad. 2017. Hukum Pidana dan Prosedur Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.

JURNAL

- Arief, Barda Nawawi. 2012. "Kebijakan Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana". Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 42 No. 3, hal. 345-362.
- Pratama, Andi. 2019. "Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 2, hal. 78-91.
- Rahmawati, Diah. 2020. "Implementasi Pasal 98 KUHP tentang Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian". Jurnal Yudisial, Vol. 13 No. 1, hal. 1-15.
- Sari, Puspita. 2021. "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Korban". Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 5 No. 1, hal. 22-35.
- Arief Amrullah, 2010, Implementasi Hak Korban Tindak Pidana Untuk Mendapatkan Ganti Kerugian, Jurnal Hukum dan Peradilan, Komisi Yudisial RI.
- Danil Rahmatsyah, Mohd. Din, dan M. Gaussyah, 2016, Implementasi Penerapan Ganti Kerugian terhadap Korban Penganiayaan di Banda Aceh, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, Vol. 18 No. 2.
- Maysarah, 2019, Mekanisme Ganti Kerugian terhadap Korban Tindak Pidana, Warta Dharmawangsa, Universitas Dharmawangsa, Edisi 59.
- Yuliandri, 2015, Implementasi Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Zulfa Djoko Basuki, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan di Indonesia, Jurnal Hukum PRIORIS, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

